

ANALISIS JURNAL

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Semester/kelas : 2/F

Dosen Pengampu : Roy Kembar Habibi, M.Pd.



Disusun Oleh:

Marliana Rahma Susanti

2413053190

**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

TAHUN AJARAN 2025

Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya pemilihan umum sebagai cerminan dari sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi seharusnya memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, kenyataannya saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan menilai pelaksanaan demokrasi sebagai sumber nilai dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif (doctrinal) dengan pendekatan hukum, mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila menekankan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pemilihan umum harus mencerminkan asas demokrasi yang adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah menghadapi tantangan, seperti rendahnya partisipasi pemilih dan kecurangan dalam pemilu.

Peran partai politik juga menjadi sorotan, di mana partai politik berfungsi sebagai instrumen demokrasi, tetapi sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penunjukan calon kepala daerah oleh partai politik sering kali tidak demokratis dan dapat menciptakan budaya "hutang budi". Kesimpulan dari dokumen ini menegaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, serta kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan dan politik untuk mencapai demokrasi yang ideal. Saran yang diberikan mencakup perlunya reformasi dalam sistem pemilihan umum untuk mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan peran partai politik dalam mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, serta penegakan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi prinsip demokrasi.